

**MODEL PARTISIPASI GURU PEREMPUAN
DALAM BERPOLITIK:
Studi Kasus dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten
Gresik**

Siti Muarifah

SMA N 1 Manyar Gresik Jawa Timur Indonesia
muarifah_77@yahoo.ocm

ABSTRAK

Guru perempuan memiliki peran besar dalam Pemilihan Umum di Indonesia tetapi tingkat keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat rendah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis orientasi politik dari guru perempuan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan evaluatif. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menyimpulkan orientasi politik dari guru wanita bervariasi tergantung pada aktivitas mereka di masyarakat. Guru perempuan yang aktif dalam organisasi politik memiliki orientasi yang sangat kuat. Sementara guru yang memiliki aktivitas non-politik, memiliki orientasi yang lebih rendah.

Kata Kunci: Orientasi politik, guru perempuan, pemilihan umum

ABSTRACT

Women teachers also have a big role in the General Election in Indonesia but the level of women

representation in politics is still very low. This research tries to analyze political orientation of women teachers that includes cognitive, affective and evaluative aspects. Through the qualitative method, the research conclusion is that the political orientation of women teachers varies depend on their activity in the community. Women teachers who active in political organizations has very strong orientation. While teachers who have non-political activity, have the lower orientation.

Keywords : *political orientation, women teacher, general election.*

A. Pendahuluan

Sosok guru di negeri ini sudah tidak asing lagi sebagai pendidik dan penyampai ilmu sebagaimana diungkapkan Mulyasa (2008: 35) bahwa semua orang yakin bahwa guru memiliki andil besar dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah, berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal, termasuk di dalamnya adalah sosialisasi politik terhadap peserta didik.

Zuhri (2010) menyatakan bahwa guru sebagai *disseminator* nilai, norma, dan perilaku politik dituntut mempunyai profesionalisme yang mapan. Aktualisasi profesionalisme itu antara lain dapat dilihat dari perspektif orientasi politik guru ketika menjalankan peran penanggung jawab (berdasarkan kompetensi) pendidikan politik secara formal di sekolah. Jika guru berorientasi pada kekuasaan negara, maka akan berperan sebagai agen, sebab guru akan bertindak sebagai mediator atau pelaksana sosialisasi politik berdasarkan ideologi penguasa. Zuhri menambahkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan dan sosialisasi, jadi tidak mengherankan jika sekolah termasuk di dalamnya pengajar salah satunya guru perempuan dapat memberikan pandangan-pandangan kongkrit tentang politik dan segala

hal tentang politik termasuk di dalamnya tentang diskriminasi perempuan dalam bidang politik, karena sekolah memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang dunia politik. Selain itu, sekolah juga dapat membangun kesadaran kepada generasi muda mengenai arti penting hidup bernegara dan cinta terhadap tanah air, demokrasi misalnya dari pelajaran kewarganegaraan.

Guru perempuan dipilih sebagai subjek penelitian dikarenakan perempuan adalah pemilih terbesar dalam pemilihan umum. Penulis penasaran dengan jumlah perempuan banyak, termasuk di dalamnya berprofesi sebagai guru terbukti dari jumlah pemilih yang hadir di pemilu perempuan lebih banyak dari laki-laki tetapi mengapa keterwakilan perempuan di legislatif tidak mencapai kuota 30%. Orientasi politik yang bagaimana yang dimiliki para guru perempuan?

Keseluruhan partisipasi politik pada umumnya dan pemilu pada khususnya merupakan suatu aktivitas yang bermakna luas yang berarti mencakup unsur kognitif, afektif, evaluatif dan kegiatan nyata seseorang. Orientasi politik mempengaruhi sikap politik seseorang. Sikap terbentuk dari proses sosialisasi yang panjang, mulai manusia baru lahir sampai dewasa. Melalui proses sosialisasi inilah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati. Tradisi budaya patriarki, politik diklaim sebagai dunianya laki-laki karena dianggap sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras dan memiliki konotasi negatif, sementara perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik saja (Bashin, 1996: 1). Dewi (2009:20) menggunakan istilah "*political is dirty*", karena faktor keras dan kotornya dunia politik ini, banyak orang berpandangan kalau politik memang milik laki-laki. Pandangan ini memiliki pengaruh cukup kuat dalam masyarakat, khususnya perempuan

dalam menentukan orientasi politiknya. Pandangan tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dalam segala wilayah kehidupan termasuk juga wilayah ranah politik. Rendahnya keterwakilan perempuan di dewan adalah salah satu bukti adanya peminggiran terhadap perempuan.

Almond dan Verba (Saad, 1993: 87) membagi orientasi politik menjadi tiga; *pertama*, orientasi kognitif, yang mengacu pada pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang sistem politik dan atributnya. Contoh: mengetahui lambang negara, lagu kebangsaan negara, siapa presiden dan wakil presiden. *Kedua*, orientasi afektif, yaitu orientasi politik yang di dalamnya berisikan perasaan-perasaan dan emosi-emosi tentang objek-objek politik atau sistem politik. Contoh: penilaian masyarakat terhadap iklan kampanye para calon kandidat presiden RI. *Ketiga*, orientasi evaluatif, merupakan tingkat tertinggi karena seseorang sudah mampu membuat keputusan dan mendapat tentang objek-objek politik serta menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Contoh: mahasiswa berdemonstrasi atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari laki-laki otomatis juga jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan begitu pula jumlah guru perempuan juga lebih banyak dari laki-laki. Ini berarti perempuan terutama guru perempuan lebih banyak menentukan gambaran peta kekuatan sosial politik dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Mengingat bahwa pemilu akan dilaksanakan sekali setiap lima tahun berikutnya, guru perempuan di sekolah punya andil yang sangat besar terhadap peserta didik, kiranya kajian tentang orientasi politik guru perempuan yang selama ini belum pernah dilakukan

menjadi cukup layak untuk diangkat ke permukaan. Artikel ini berupaya menjelaskan orientasi politik secara kognitif, afektif dan evaluatif guru perempuan di Gresik dalam Pemilu Legislatif 2009. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi manfaat : (1) secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan konsep orientasi politik. (2) secara praksis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi guru perempuan dalam menentukan orientasi politiknya.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur. Gresik adalah salah satu kabupaten yang cukup religius yang memiliki masalah yang cukup kompleks dengan ideologi patriarki yang kental dengan indikator sedikitnya pemimpin perempuan baik di bidang politik, pendidikan dan sosial. Karakteristik subjek penelitian ini adalah guru perempuan yang mengajar di SMA berusia 40 tahun ke atas dan aktif di organisasi sosial, politik atau profesi.

B. Pembahasan

1. Orientasi Politik

Almond dan Verba (Gatara & Said, 2007: 237) mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Pengertian budaya politik (Gatara & Said, 2007:242) akhirnya masuk pada pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual. Almond dan Verba (Gatara & Said, 2007: 242) juga merumuskan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, bahwa dalam budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut; *Orientasi kognitif, orientasi, orientasi evaluatif*.

a. Orientasi Kognitif

Orientasi kognitif menurut Almond & Verba adalah pengetahuan dan pengenalan dari dan tentang sistem politik, peranan-peranannya dan peranan pemegang jabatan, peranan input outputnya (Saad, 1993: 12). Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu.

b. Orientasi Afektif

Orientasi afektif menurut Almond & Verba adalah pemahaman terhadap sistem politik, peranan-peranan personil dan prestasinya (Saad, 1993: 15). Gatara dan

Said (2007: 242) menyimpulkan pendapatnya Almond & Verba bahwa orientasi afektif berisikan emosi-emosi dan perasaan terhadap sistem politik, objek, peranannya, para aktor dan penampilannya. Orientasi afektif ini bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan seperti diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya, kerap lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis (sifatnya populer) untuk mendongkrak aspek afektif warga negara.

c. Orientasi Evaluatif

Orientasi evaluatif merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan/tindakan (Gatara & Said, 2007: 242). Keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Misalnya, setelah mengetahui bahwa partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, individu memilih mereka di dalam suatu pemilu. Atau, sekelompok individu menggelar unjuk rasa untuk mendukung seorang calon yang tengah ‘diserang’ oleh lawan politiknya, semata-mata karena mereka merasa kenal dan sedikit tahu akan jati diri si politisi termaksud. Orientasi evaluatif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif. Almond membagi tiga golongan objek, yaitu : 1) peranan dan struktur-struktur khusus yang membentuk sistem, 2) pemegang-pemegang jabatan dalam sistem, 3) kebijaksanaan-kebijaksanaan, keputusan-keputusan atau pelaksanaan dari keputusan-keputusan (Said, 1993: 23).

2. Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 dan Partisipasi Politik Perempuan

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syarbaini, 2004: 80). Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berhubungan dengan legitimasi rakyat. Kekuasaan pemerintahan diperoleh melalui pemilihan dari rakyat atau disebut dengan pemilu. Dalam kondisi normal atau wajar biasanya pemilu dilakukan secara rutin atau berkala. Di Indonesia pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Masing-masing pemilu yang telah dilaksanakan memiliki cerita dan catatan sejarahnya sendiri.

Pemilu 2009 adalah kelanjutan dari mekanisme pemilu 2004, yang banyak disebut sebagai pemilu yang demokratis dalam sejarah bangsa Indonesia karena, *pertama*, rakyat dapat memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen beserta presiden dan wakil presiden. *Kedua*, adanya kebijakan *affirmative action* yang memperhitungkan representasi suara (aspirasi) perempuan minimal tiga puluh persen, kebijakan ini juga dikenal dengan kuota 30 % bagi perempuan. Wardani (2010: 98) menjelaskan bahwa dalam UU No.12/2003, tindakan afirmatif diatur dalam Pasal 65 yang memuat tentang partai politik memperhatikan pencalonan perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen sebagai anggota legislatif. Aturan tersebut direvisi dalam UU No.10/2008, ada dua pasal yaitu Pasal 53 (daftar calon memuat minimal 30 % perempuan) dan Pasal 55 (dalam daftar calon, setiap tiga nama calon sekurang-kurangnya terdapat satu calon perempuan).

Affirmative action ini menurut Gadis Arivia merupakan langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih substantif dan bukannya formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum

perempuan (Dewi, 2009: 6). Kebijakan *affirmative action* ini mendorong banyak aktivis perempuan yang masuk ke partai politik, namun yang berhasil ke Senayan hanya segelintir orang termasuk di tingkat daerah. Begitu tingginya perhatian banyak kalangan pada kaum perempuan untuk mendapatkan hak politik yang sama, kesadaran dan partisipasi perempuan sendiri untuk itu sama sekali masih rendah. Kesimpulan yang muncul kemudian adalah ketidakterwakilan perempuan di legislatif lebih disebabkan oleh faktor ketidakmampuan perempuan sendiri dalam menunjukkan daya saing dan bukan karena diskriminasi gender di depan hukum dan pemerintahan. Wardani (2010: 96) menguatkan pendapat Gadis Arivia bahwa isu perempuan dan politik berkembang seiring dengan kesadaran bahwa politik merupakan arena yang layak diperjuangkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang adil.

3. Partisipasi Politik

Orientasi politik yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan (*action*) dan terutama diorientasikan kepada nilai-nilai otoritatif, orientasi itu tampak menjadi perilaku politik. Salah satu wujud perilaku politik adalah partisipasi politik. Partisipasi menurut Ramlan Surbakti dalam Gatara (2008: 311) ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal-hal substantif yang berkenaan dengan partisipasi tersebut adalah: 1) kegiatan-kegiatan nyata; (2) bersifat sukarela; (3) dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok; (4) memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mencari jabatan politik; dan (5) memiliki tingkatan partisipasi.

Bentuk-bentuk partisipasi politik dipaparkan oleh Surbakti (1992: 25) sebagai berikut: a) Partisipasi sebagai

kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif berupa usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah. b) Partisipasi dibedakan menjadi beberapa kategori, *pertama* apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator yaitu orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. *Ketiga*, gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik. *Keempat*, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tidak konvensional. c) Partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Partisipasi politik dibagi menjadi enam tingkatan kelas sosial, yaitu aktivis politik, komunikator, sikap dan informasi politik lainnya, warga negara marginal dan orang yang terisolasi. d) Kategori berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi secara kolektif berbentuk kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilu.

Berbagai kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo dalam Chotib (2006: 13), antara lain: 1) ikut memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum, seperti: a) mengajukan beberapa alternatif calon pemimpin; b) mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu; c) mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum; d) mengajukan tuntutan-tuntutan kepada penguasa pusat maupun daerah; e) melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan; dan f) membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya yang ke-2) menjadi anggota aktif partai politik, kelompok penekan (*pressure group*), maupun kelompok kepentingan tertentu.

4. Teori Tindakan Sosial dan Orientasi Subjektif Talcott Parsons

Budiardjo (1985:49) berpendapat bahwa kegiatan politik seseorang tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang didambakannya, tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik.

Komponen-komponen sistem politik menurut Miriam Budiardjo adalah:

“ 1) kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat; 2) kepentingan sebagai tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik; 3) kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undangan; 4) budaya politik yang merupakan orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik” (Budiardjo, 1985: 49).

Empat komponen tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons dalam Ritzer dan Goodman, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan (Ritzer & Goodman, 2008:121). Tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma. Tindakan individu

manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai.

Talcott Parsons mengatakan bahwa sistem-sistem sosial terbentuk dari tindakan sosial individu. Sebuah analisisnya yang menggunakan kerangka alat-tujuan (*means-ends framework*) yang menggambarkan teori tindakan sosial yang bersifat voluntaristik, menurut inti pemikiran Parson adalah bahwa :

- (1) tindakan itu diarahkan pada tujuannya (atau memiliki suatu tujuan); (2) tindakan terjadi dalam suatu situasi, di mana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai alat menuju tujuan itu; dan (3) secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. (Lawang, 1986: 106).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa tindakan itu dilihat sebagai suatu kenyataan sosial yang kecil dan paling fundamental. Komponen-komponen dasar dari satuan tindakan adalah tujuan, alat, kondisi dan norma. Alat dan kondisi berbeda dalam hal di mana orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat dalam usahanya mencapai tujuan, kondisi merupakan aspek situasi yang tidak dapat dikontrol maupun diamati oleh orang yang bertindak itu.

Selanjutnya, Parsons mengemukakan bahwa sebagian besar perilaku manusia dapat dilihat sebagai bagian dari suatu rantai alat dan tujuan yang bersifat kompleks dan panjang. Pada mata hubungan dalam suatu rantai seperti itu, keputusan harus diambil dalam menyeleksi alat dan tujuan. Teori Parson ini pada dasarnya merupakan suatu sintesa dari titik pandangan positivisme dan idealisme yang saling bertentangan sedangkan Parsons melihat analisisnya itu sebagai suatu sintesa antara idealisme dan positivisme.

Ritzer (1992) menceritakan bahwa Talcott Parsons merupakan pengikut Weber yang utama. Teori Aksi yang dikembangkanya mendapat sambutan luas. Parsons seperti

pengikut Teori Aksi lainnya menginginkan pemisahan antara Teori Aksi dengan aliran behaviorisme. Dipilihnya istilah “*action*” bukan “*behavior*” karena menurutnya mempunyai konotasi yang berbeda. Behavior secara tidak langsung menyatakan kesesuaian secara mekanik antara perilaku (*respons*) dengan rangsangan dari luar (*stimulus*). Sedangkan istilah *action* menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu. Parsons dengan hati-hati sekali membedakan antara Teori Aksi dengan Teori Behavior atau perilaku. Parsons menjelaskan bahwa Teori Aksi memang tidak dapat menerangkan keseluruhan aspek kehidupan sosial. Walaupun Teori Aksi berurusan dengan unsur-unsur yang paling mendasar dari kehidupan sosial namun ia mengakui bahwa unsur-unsur yang paling mendasar dari kehidupan sosial itu tidak berurusan dengan keseluruhan struktur sosial.

Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai *voluntarism*. Voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.

Konsep voluntarisme Parsons inilah yang menempatkan Teori Aksi ke dalam paradigma definisi sosial. Aktor menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya

membatasi kebebasan aktor. Tetapi di sebelah itu aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif.

Guru perempuan melakukan suatu tindakan partisipasi dalam Pemilu Legislatif 2009 dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat, pada saat guru perempuan memilih wakil rakyat, dipengaruhi oleh orientasi politiknya. Orientasi politik seseorang berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsiran atas suatu stimulus atau situasi tertentu. Tindakan guru perempuan dalam memilih wakil rakyat menurut Parsons dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya dan kepribadian karena menurut Parsons, tindakan individu bukanlah yang utama tapi nilai dan norma yang mengatur dan mempengaruhi tindakan individu.

5. Orientasi Politik Guru Perempuan di Gresik Dalam Pemilu Legislatif 2009

Orientasi kognitif menurut Almond & Verba adalah pengetahuan dan pengenalan dari dan tentang sistem politik, peranan-peranannya dan peranan pemegang jabatan, peranan input outputnya (Saad, 1993). Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu.

Pemahaman tentang Pemilu Legislatif 2009, antara lain tentang nama partai politik yang lolos verifikasi, nama calon-calon legislatif, juru kampanye, tata cara penyelenggaraan pemilu dan penghitungan suara. Ke-33 partai yang ikut pemilu legislatif 2009 ternyata tidak semua diketahui oleh

subjek penelitian, hanya beberapa partai yang diketahui terutama partai yang sudah didukung dan akan dipilih. Seperti penuturan salah seorang subjek penelitian di bawah ini :

“... Saya *ndak hapal* dengan partai-partai politik, tapi kalau partai politik yang besar tahu, mungkin paling banyak *sepuluhlah*, tahu dari TV, informasi teman-teman, dan dari pamflet-pamflet yang ada di gambar *tu* kan bisa kita lihat o ini berarti lolos verifikasi...” (wawancara dengan Bu Tika)

Berbeda dengan penuturan Bu Shofiyannah yang dapat menyebutkan partai sampai separuh dari jumlah partai yang lolos verifikasi dan sama halnya dengan penuturan bu Janiyah di bawah ini :

“... Yang saya ketahui pada Pemilu 2009 yaitu diantaranya, yaitu PPP, Hanura, PKNU, PDIP, Demokrat, Golkar, PKB, ini adalah partai-partai yang mendapatkan suara terbanyak akan tetapi apapun partainya *kalo* penguasa sudah di atas maka secara *ndak* langsung bisa mengalahkan partai yang lain sebab mau *ndak* mau finansialnya lebih banyak daripada yang tidak punya jabatan di atas apalagi calon yang dimunculkan itu tidak punya *background* sama sekali...” (wawancara dengan Bu Janiyah)

Sementara untuk guru-guru yang aktivitasnya tidak bersentuhan langsung dengan dunia politik ternyata hanya tahu partai politik yang ikut pemilu sampai pada pengetahuan partai-partai yang besar-besar saja. Hal ini seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Almond & Verba (Saad, 1993: 15) bahwa salah satu aspek yang terkait dengan orientasi kognitif seseorang terhadap pemilu adalah bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut. Menurut penulis setidaknya atau minimal individu mengetahui partai mana dan partai apa yang akan dipilih.

Nama-nama calon legislatif banyak disebut oleh Bu Shofiyannah dan nama-nama calon legislatif dari partai politik dengan mudah dikenal oleh narasumber dari spanduk di jalan, poster, termasuk media massa, baik elektronik maupun cetak. Seperti penuturan salah satu sumber :

“... Biasanya saya tahunya siapa yang *nyalon* itu dari spanduk, koran, TV, poster-poster di jalan...” (wawancara dengan Bu Tika)

Informasi di atas menunjukkan bahwa media massa ternyata berperan penting dalam orientasi kognitif seseorang, di mana media massa merupakan agen sosialisasi. Agen sosialisasi yang lain adalah : a) keluarga; b) teman bermain; c) sekolah; d) tempat kerja; dan e) lingkungan. Sosialisasi politik adalah suatu proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

Sosialisasi ini memang tidak sekedar didesain memberi informasi semata-mata, apalagi hanya disempitkan memberi pengetahuan tentang tata cara memilih kepada para pemilih. Lebih dari sekedar pengetahuan teknis seperti itu adalah memberikan pembelajaran politik yang cerdas dan kritis atau setidaknya memberi pengetahuan yang bersifat preferensial bagi pemilih agar memilih secara bebas sesuai dengan hati nurani dan bertanggung jawab. Instrumen sosialisasi tergambar dari mulai diedarkannya poster, baliho dan spanduk (Laporan KPUD Gresik, 2009).

Bu Wiwik menguatkan pendapatnya Bu Tika, sebagai berikut :

“...Lebih bagus Pemilu sekarang, kenal tokohnya, orangnya, kenal dari media, koran, ada tokoh yang sebelumnya *opo yo istilabe* terkenal di Televisi, *nek* jurkamnya *ndak* tau..*nek dikit tau* caleg-calegnya terutama partai-partai besar...”

Penuturan Bu Wiwik di atas sekaligus memperjelas sistem Pemilu langsung yang bisa mengetahui, mengenal langsung calon sehingga sesuai dengan keinginan pemilih.

Penuturan Bu Janiyah memperjelas bahwa pemahaman calon yang maju hanya sebatas mereka yang berasal dari partainya sendiri dan cenderung primordialisme :

“...Saya mengenal dan akrab itu dengan pak Chumaidi yang sudah menjabat dua kali putaran Alhamdulillah, masyarakat masih mempercayainya karena kejujuran. Zaman sekarang jujur itu adalah manusia yang langka. Apalagi kalau sudah menjabat...”

Primordialisme adalah suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, suku, agama, keluarga maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Secara etimologis, primordialisme berasal dari kata bahasa Latin “*primus*” yang artinya pertama dan “*ordiri*” yang artinya tenunan atau ikatan.

Iwan Santosa (2009: 54) berpendapat bahwa sikap primordialisme politik disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik di kalangan masyarakat negeri ini sehingga pemahaman mengenai arti berdemokrasi saja lebih diartikan sebagai kebebasan dalam melaksanakan ekspresi politik. Ekseksnya, kalau menang menjadi sangat dominan dan memaksa minoritas tunduk pada kemauan mayoritas. Kalau kalah, bebas mengekspresikan kekalahan dengan demo, boikot bahkan tidak sedikit mengarah kepada tindakan anarki. Penyebab lainnya adalah perilaku elite politik itu sendiri, demi mengejar kepentingan politik semusim, ternyata ikut andil menumbuhkan primordialisme di kalangan masyarakat.

Banyak subjek penelitian yang tidak mengenal juru kampanye bisa disebabkan mereka tidak ikut kampanye dan untuk guru PNS ada Undang-undang Pemilu pasal 84 yang melarang PNS tidak boleh ikut kampanye sehingga ini membuat orientasi kognitif guru perempuan tentang jurkam cenderung lemah.

Almond & Verba (Saad, 1993: 12) menjelaskan bahwa orientasi kognitif adalah pengetahuan dan pengenalan dari dan tentang sistem politik, peranan-peranannya dan peranan

pemegang jabatan. Juru kampanye merupakan bagian dari sistem pemilu karena kampanye adalah salah satu tahapan yang dilalui oleh partai peserta pemilu. Kampanye juga merupakan salah satu ajang sosialisasi dan upaya meraup suara sebanyak-banyaknya dari pemilih, sehingga kampanye selalu diselenggarakan dalam setiap Pemilihan Umum. Partai politik pun secara *all out* akan memanfaatkan momentum ini.

Hanya Bu Janiyah saja yang dapat menjelaskan bagaimana gambaran sederhana penyelenggaraan Pemilu :

“...Setiap kecamatan ada panitianya, panitia kecamatan nanti sosialisasi ke daerah-daerah. Di daerah/desa juga membentuk panitia yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan saksi-saksi dari partainya masing-masing yang mana di desa saya ada saksi dari PKNU, PKB, Hanura, PDIP, Golkar, PPP dan Demokrat pada saat pencoblosan sebab pada saat itu saya dijadikan Panwaslu di desa saya Banjarsari. Ketua Panitia dan anggotanya disumpah akan melaksanakan sumpahnya sebagai panitia supaya yang LUBER...”

Pemahaman orientasi politik subjek penelitian dengan kategori kognitif dipengaruhi oleh sosialisasi politik, partisipasi politik, primordialisme. Sosialisasi politik adalah suatu proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

Parson memandang bahwa sistem sosial menjaga stabilitas dan mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan proses sosialisasi yang intensif ketika nilai-nilai yang menopang sistem dipegang oleh kaum tua. Dalam pandangan Parson sosialisasi menjamin stabilitas, tidak membawa modernisasi atau perubahan sosial.

Orientasi kognitif guru perempuan berdasarkan teori tindakan sosial yang bersifat voluntaristik, menurut inti pemikiran Parson adalah bahwa : 1) tindakan yang dilakukan guru perempuan dalam hal pemahaman terhadap partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye, sistem pemilu

dan penghitungan suara diarahkan untuk; 2) berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2009; 3) Tindakan yang dilakukan oleh guru perempuan tersebut secara normatif sesuai dengan budaya politik melalui alat organisasi yang diikuti yaitu organisasi politik, sosial, keagamaan, ekonomi dan lingkungan.

Pada tahap orientasi afektif ini, sudah ada kecenderungan partai politik yang diminati itulah yang dipahami dan dirasakan. Seperti penuturan Bu Tika di bawah ini:

“... Kalau gambar, dan nomor partai politik saya tahu, biografi caleg dari partai saya, saya tahu, tapi visi misi tahu sedikit. Mengenai penegakan hukum saya kira belum terlalu prinsip karena saya lihat banyak pelanggaran pemilu tapi yang ditindak hanya sebagian saja...”

Hal ini senada dengan penuturan Bu Wiwik :

“...Kalau arti gambar partai saya, saya tahu, nomor urutnya juga saya tahu, kalau tidak tahu kan bingung *nyoblosnya*, kalau biografi sudah tidak penting karena siapapun yang dipilih partai saya mesti baik...”

Ada yang sangat menarik adalah penuturan Bu Janiyah:

“...Kalau membahas biografi dari masing-masing caleg saya kurang tahu yang jelas menurut saya adalah partai saya sendiri itu yang paling bagus dari seluruh caleg, mengenai visi misi partai saya yaitu LUBER dan mempersatukan bangsa yang bernaungan Ahlussunnah Waljamaah, bicara kesesuaian itu memang dilema namanya juga politik, tidak semua Undang-undang sesuai dengan kenyataannya kalau sudah berada di lapangan apalagi menyangkut hukum yang kurang ditegakkan, ada yang sesuai ada yang tidak sesuai, dalam hal perkembangan penghitungan suara saya mengikuti terus sebatas partai yang dukung dan saya ketahui, memang terkadang ada satu partai yang curang dalam penghitungan itupun karena rapinya pengaturan sehingga ada yang ketahuan ada yang tidak, itulah politik...”

Kategori orientasi afektif ini senada dengan teori tindakan sosial voluntaristiknya Parson, tindakan yang dilakukan perempuan berdasarkan perasaannya atau kesukaannya, yang ditujukan untuk berpartisipasi dalam memilih baik partainya, *calegnya*, juru kampanyenya dan perkembangan penghitungan suara.

Partisipasi dan kesadaran politik guru perempuan meliputi memilih (mencontreng), menjadi anggota partai politik, berkomunikasi dengan wakil rakyat, mengikuti kampanye, menghadiri diskusi tentang politik dan menjadi juru kampanye.

Pemilihan calon anggota legislatif, penulis mempertanyakan pilihan guru perempuan apakah memilih calon laki-laki atau perempuan, dan jawaban Bu Janiyah adalah:

“...Ketepatan Pemilu saya tidak hanya *nyoblos/nyontreng* melainkan hadir sebagai pemilih juga sebagai pemantau tiap-tiap TPS untuk melihat dan mengamati langsung ke tempat TPS-TPS barangkali ada kecurangan panitia atau melihat ada pemilih yang tidak konsekuen terhadap partai kita setelah hasil sosialisasi sebelum pencoblosan. Saya pilih caleg laki-laki sebab kebetulan caleg laki-laki pada saat itu bisa diandalkan untuk dijual ke masyarakat sedangkan caleg perempuan belum bisa entah besok dengan perkembangan era globalisasi kini perempuan sudah layak dan sejajar dengan kaum laki-laki hanya saja kesempatan yang belum ditakdirkan. Mudah-mudahan ke depan ada caleg perempuan yang handal dan jujur...”

Hal ini senada dengan ungkapan Bu Nur untuk memilih laki-laki dengan alasan kapasitas :

“...Saya pada saat Pemilu, memilih perempuan yang DPRD I, yang kabupaten milih laki-laki, bukan apa-apa karena saya tahu kapasitas calon perempuan sehingga saya tidak memilih perempuan...”

Dikuatkan juga oleh jawaban Bu Wiwik dan Bu Tika dengan alasan stereotype kekuatan dan kepemimpinan perempuan :

“... saya mencontreng calon laki-laki karena menurut saya kinerjanya lebih kuat laki-laki dengan yang perempuan...” (Bu Wiwik)

“... Saya pilih laki-laki karena biasanya laki-laki itu sebagai imam, sebagai seorang pemimpin dan karena memang dalam agama Islam itu *ya* didahulukan laki-lakinya daripada perempuan, dan ada prioritas kalau ada laki-laki kenapa *gak* laki-laki *aja?*,,,” (Bu Tika)

Jawaban berbeda penulis dapatkan dari Bu Shofiyanah dan cukup menggembirakan penulis :

“...Saya menginginkan yang perempuan, seringnya bapak-bapak itu kalau ada perempuan di partai terus ditinggal. Saya berharap perempuan memilih perempuan, sudah saatnya perempuan diperhitungkan...” (Bu Shofiyanah)

Ternyata penuturan Bu Janiyah, Bu Nur, Wiwik dan Bu Tika diamini oleh semua subjek penelitian kecuali suara Bu Shofiyanah yang memilih perempuan. Tentang pemilihan calon laki-laki dan perempuan menurut penulis sangat erat kaitannya dengan persoalan gender.

Menurut Mansour Fakih (1999: 7) untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki *jakala* (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada

manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

Konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sebaliknya melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya karena

kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh pada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat (Fakih, 1999: 9-10).

Situasi budaya Jawa yang memberi label stereotip terhadap perempuan. Stereotip perempuan Jawa yang mempunyai sifat-sifat *nrimo*, sabar, *pasrah*, halus, setia dan berbakti ternyata masih merupakan gambaran ideal mengenai perempuan Jawa pada umumnya. Secara objektif, bagi perempuan Jawa masa kini, gambaran tersebut rasanya tidak sesuai lagi dengan cara mereka sekarang menampilkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Dalam berbagai peran yang diisinya, wanita Jawa dapat menunjukkan sikap yang tegas, berinisiatif, malahan tidak kalah tangkas dari kaum pria. Ia pun berani menolak sesuatu bila tidak sesuai dengan pandangannya (tidak *nrimo* dan *pasrah* lagi). Ia juga tidak segan-segan mengutarakan pendapatnya bilamana dipandang perlu.

Orientasi politik guru perempuan ternyata masih belum optimal baik ranah orientasi kognitif, afektif apalagi evaluatif di mana kebanyakan guru perempuan memilih calon legislatif dari kelompok laki-laki padahal banyak perempuan yang mencalonkan tapi ternyata tidak menjadi prioritas preferensi memilih.

Kategori orientasi evaluatif, sudah pada tahap penilaian terhadap sitem pemilu itu sendiri termasuk di dalamnya penilaian terhadap caleg baik laki-laki maupun perempuan. Sebuah pilihan dilakukan oleh guru perempuan demi tujuan yang diinginkan melalui pemilu, merupakan tindakan sosial voluntaristik.

Mengenai keikutsertaan dalam partai politik dan menjadi juru kampanye, kebanyakan menggeleng pertanda bahwa mereka tidak mau ditanya lebih dalam lagi apalagi untuk guru negeri ada aturan tidak boleh aktif di partai politik. Tetapi mengikuti kampanye dan menghadiri diskusi politik, mereka ikut meskipun tidak berperan utama. Tingkat partisipasi yang tinggi nampak terlihat pada dua subjek penelitian yaitu Bu Janiyah dan Bu Shofiyannah :

“...Saya menjadi anggota dan pengurus partai politik sejak pemilihan 2009 itu pun kebetulan ada kesempatan, jadi harus lebih banyak belajar tentang politik apalagi politik yang bersih dari nepotisme, apa ada semua itu tergantung pada pelakunya. Alhamdulillah saya biasa dan selalu berkomunikasi dengan DPRD tapi itu pun DPR partai saya sebab dengan adanya komunikasi kita akan solid dalam tim, dengan adanya tim maka kemenangan ada di pihak kita. Saya selalu mengikuti kampanye, karena dengan ikut serta kampanye maka saya melihat secara langsung dari masyarakat yang mau memilih caleg kita, dengan demikian saya bisa memprediksi berapa persenkah yang antusias terhadap partai kita. Saya sering menghadiri diskusi tentang politik. Pada saat hari tenang H-3 dari pencoblosan itu pun dihadiri oleh panitia inti saja yang mana membahas gerakan yang harus dilakukan untuk kemenangan...”

Berdasarkan partisipasi guru perempuan yang menjadi subjek penelitian ini dapat dibedakan budaya politik *kaula* yaitu subjek penelitian yang cenderung pasif dan budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang subjek penelitiannya cenderung tinggi.

Temuan hasil penelitian ternyata memiliki relevansi terhadap teori tindakan sosial seperti, tindakan yang

dilakukan guru perempuan dalam partisipasinya di Pemilu Legislatif 2009 tergantung dari orientasi politiknya.

Orientasi politik yang dimiliki guru perempuan pun ternyata ada relevansinya dengan kepedulian terhadap situasi politik di masyarakat. Guru perempuan yang aktif di politik cenderung punya orientasi politik yang kuat terhadap sistem pemilu. Sementara guru perempuan yang aktif di sosial kemasyarakatan cenderung biasa dalam hal orientasi politiknya terhadap sistem pemilu.

Orientasi politik guru perempuan juga terkait erat dengan sosialisasi di mana sosialisasi yang efektif untuk guru perempuan adalah media massa terutama berita televisi. Partai yang berkampanye melalui media massa ternyata mudah dicerna oleh guru perempuan. Selain sosialisasi ada unsur primordialisme dalam menentukan orientasi politiknya. Primordialisme ini sudah mengakar sejak kecil dari keluarga sampai dewasa. Orientasi politik pada akhirnya terimplementasi dari partisipasinya terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, sebagai partisipan aktif atau pasif.

Tindakan guru perempuan yang berdasarkan ketiga orientasinya, orientasi kognitif, afektif dan evaluatif melalui alat organisasi sebagai back ground aktivitas mereka meliputi organisasi partai politik, Aisyiyah, Muslimat, KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), LSM dan lingkungan. Aktivitas yang dilakukan guru perempuan disesuaikan dengan tata nilai masyarakat, dalam hal ini adalah budaya Jawa dan sistem Pemilu itu sendiri. Pada akhirnya tujuan dari tindakan guru perempuan dengan berbagai orientasinya, menuju pada partisipasi guru perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009.

Teori Almond & Verba menjelaskan orientasi politik guru perempuan yang terimplementasikan dalam tindakan guru perempuan, tindakan ini diperkuat dengan teori tindakan voluntaristiknya Talcott parson dan menghasilkan

partisipasi guru perempuan dengan kategori aktif dan pasif sesuai dengan teori partisipasinya Ramlan Surbakti.

C. Simpulan

Orientasi politik guru perempuan di Gresik baik kognitif, afektif maupun evaluatif dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam aktivitas politik. Dengan demikian guru yang mempunyai latar belakang keterlibatan dalam kegiatan politik, orientasi politiknya sangat kuat, sementara guru yang berlatar belakang non politik maka orientasi politiknya biasa saja. Guru perempuan yang aktif di politik cenderung punya orientasi politik yang kuat terhadap sistem pemilu, sementara guru perempuan yang aktif di sosial kemasyarakatan cenderung biasa dalam hal orientasi politiknya terhadap sistem pemilu. Orientasi politik guru perempuan juga terkait erat dengan sosialisasi dimana sosialisasi yang efektif untuk guru perempuan adalah media massa terutama berita televisi sehingga partai yang berkampanye melalui media massa ternyata lebih dikenal oleh guru perempuan. Selain sosialisasi, juga ditemukan adanya unsur primordialisme dalam menentukan orientasi politiknya. Orientasi politik guru perempuan ternyata masih belum optimal baik ranah orientasi kognitif, afektif apalagi evaluatif di mana kebanyakan guru perempuan memilih calon legislatif dari kelompok laki-laki padahal banyak perempuan yang mencalonkan tapi ternyata tidak menjadi prioritas preferensi memilih. Orientasi politik guru perempuan ini pada akhirnya terimplementasi dalam partisipasinya terhadap pelaksanaan pemilihan umum, sebagai partisipan aktif atau pasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, W., 2006, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bashin, K., 1996, *Menggugat Patriarki Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, Jakarta: Yayasan Bentang Budaya dan Kalyanamitra.
- Budiarjo, M., 1985, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Dewi, S.M., 2009, *Orientasi Politik Perempuan Marginal*. Kudus: Brillian Media Utama.
- . 2010. “Politik Uang di Mata Perempuan: Studi Kasus Pada Pemilu Tahun 2009” dalam *Palastren Jurnal Studi Gender*, Vol. 3, No.2.
- Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat DEPDIKBUD, 2007, “Orientasi Nilai Guru Wanita dalam Pilihan Karier Pofesi Guru”, *Laporan Penelitian*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hamidi, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : UMM Press.
- KPU Gresik. 2009. *Laporan Kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kabupaten Gresik*.
- , 2009, *Profil Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik Pemilu Legislatif Tahun 2009*.
- Miles, M. B. & Michael, H. A., 1994, *Qualitative Data Analysis : an Expanded Source Book*, United States of America : Sage Publications.

- Mulyasa, E., 2008, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narwoko J, D. dan Suyanto, B, 2007, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Peter S. & Salim, Y., 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta.
- Ritzer, G., dan Goodman, D. J., 2008, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana.
- Ritzer, G., 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press.
- Saad, M., 1993, “Pemilu di Daerah Pedesaan (Suatu Kajian Orientasi Politik Pemilih di Tiga Desa di Sulawesi Selatan)”, *Tesis S-2 Pascasarjana FISIP-UI*.
- Sahid, G., dkk., 2007, *Sosiologi Politik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarbini, S., *et all.* 2004, *Sosiologi dan Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)*. UU RI Nomor 20 Tahun 2003.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wardani, S.B.E., 2010, “Perempuan dan Pilkada Langsung: Meretas Jalan Kesetaraan dalam Politik?” dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21.
- Zuhri, S., 2010, *Peranan Sekolah dalam Proses Sosialisasi Politik*, Tesis S-2 Pascasarjana UNDIP.